



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 1 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VII)

**Rabu, 1 Juli 2020, Pukul 11.13 – 12.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |
| 9) Arief Hidayat | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Saiful Mashud

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Wilman Malau

C. Saksi dari Pemohon:

1. Zarkasih
2. Kusdiono
3. Wisnu Wicaksono

D. Pemerintah:

1. Rudy Hendra Pakpahan
2. Fauzanul Ikhwan
3. Ahmad Suryamandala
4. Maria Erna

E. Pihak Terkait:

1. Anis Hidayah (Migrant Care)
2. Heriyanto (Serikat Buruh Migran Indonesia)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Siti Badriah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan dari Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019. Dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri lagi, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Perkenalkan kami memperkenalkan diri. Yang hadir dari Pemohon hari ini adalah Wilman Malau, sebagai Kuasa Pemohon. Kemudian, Pak Saiful Mashud sebagai Pemohon. Di samping itu kami membawa tiga orang untuk dijadikan saksi, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. DPR tidak ada, berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: MARIA ERNA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami perkenalkan Kuasa dari Pemerintah, ada tiga unsur. Yang pertama dari Kumham, yaitu Saudara Rudy Pakpahan dan di belakang ada Saudara Fauzanul Ikhwan. Dan yang kedua dari Kementerian Tenaga Kerja, ada Saudara Ahmad Suryamandala, ada di belakang saya, Majelis, dan saya Maria dari Kejaksaan. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Pihak Terkait, Migrant Care?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Dari Pihak Terkait hadir Prinsipal dari Migrant Care diwakili oleh

Ibu Anis Hidayah dan dari Serikat Buruh Migran Indonesia hadir, Bapak Heriyanto. Dan Kuasa Hukum, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Ibu Siti Badriah, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari Migrant Care sama Serikat Buruh Migran, Kuasa Hukumnya sama, ya?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia, sama.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, terima kasih. Ya, agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon ada tiga orang, Pak Zarkasih, Pak KUSDIONO, Pak Wisnu Wicaksono. Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya dulu!

Yang Mulia Pak Wahid mohon untuk membimbing.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi Zarkasih, mana? Pak Zarkasih? KUSDIONO? Wisnu Wicaksono? Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, mohon kembali ke tempat. Untuk Pak Zarkasih langsung ke podium! Ya, silakan mau dituntun oleh Pemohon, apa ditanyakan, atau langsung memberi keterangan? Silakan!

13. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Langsung saja, Yang Mulia?

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung. Waktunya paling lambat 10 menit nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan!

15. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Yang Mulia Hakim (suara tidak terdengar jelas) 83/PUU-XVII/2019. Perkenalkan nama saya Zarkasih. Lahir di Jember, tanggal 5 Desember 1966. KTP terlampir. Adalah pemilik PT Asfiz Langgeng Abadi. Bahwa izin saya ... izin perusahaan saya Nomor 2 ... 2 ... 268/17 masih hidup sampai tanggal 10 September 2022. Bahwa perusahaan saya bukan objek Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 karena izin perusahaan saya masih hidup dan pasal tersebut diperuntukkan atau hanya untuk ditujukan pada orang yang belum mempunyai izin ... izin penempatan tenaga kerja Indonesia, atau bagi seorang yang baru membuat akte pendirian perusahaan penempatan, atau orang yang baru mendaftarkan diri, mendaftarkan akta pendirian perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia di Kemenkumham RI dan kemudian mengajukan permohonan SIP (Surat Izin Pelaksanaan) penempatan tenaga kerja Indonesia pada Kementerian Tenaga Kerja.

Menurut hemat saya, tidak ada aturan membolehkan undang-undang yang berlaku surut, kecuali kaitan dengan hak asasi manusia hal mana bertentangan dengan undang-undang ... Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa izin PPTKS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta) saya tengah jalan dicabut karena dianggap tidak memenuhi Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18, sementara saya sementara waktu ajukan (...)

16. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, ini kan statusnya sebagai saksi, jadi bukan ahli. Jadi, jangan memberikan pendapat! Jadi apa yang dialami, yang diketahui, begitu saja. Jadi jangan pendapat, ya! Kalau pendapat itu sebagai ahli. Ini yang diajukan sebagai saksi oleh Pemohon, ya.

17. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

19. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Maaf, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi sebagai ... apa ... kalau pendapat itu ahli. Jadi dilewati saja!

21. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Oh, ya, ya.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Gitu.

23. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa PT saya ditengah ... izin dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1), sementara dicabut.

Bahwa PT saya berdiri sejak ... sejak berdiri pada ... deposito saya Rp500.000.000,00 tidak pernah ... baik separuh maupun sebagian dicairkan berkenaan dengan penempatan (ucapan tidak terdengar jelas). Walaupun saya telah mendapatkan 3.500 ke luar negeri.

Bahwa kementerian ... Kemenaker memberi ketegasan menambah deposit Rp500.000.000,00 menjadi Rp1 koma miliar adalah surat izin penempatan tenaga kerja luar negeri adalah tidak diubah menjadi SIP3S, sesuai janji Pasal 54 ayat (1) undang-undang ... sementara perusahaan tidak (...)

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak, mohon maaf. Coba ngomongnya agak jelas, Pak! Enggak bisa kita mendengarnya itu (...)

25. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Oh, ya (...)

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bagaimana mau menanyakan nanti. Jelas ... jelas! Pelan-pelan!

27. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya, ya, ya.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya?

29. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba agak teratur ngomongnya, gitu! Pelan-pelan! Nantikan ... kalau kita kan enggak bisa menyimak, misalnya yang Bapak kan ... apa (...)

31. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pelan-pelan saja! Enggak ada yang mengejar kok, Pak, gitu.

33. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya. Bahwa bukti (ucapan tidak terdengar jelas) yang menambah deposito Rp500.000.000,00 menjadi Rp1,5 miliar sampai saat ini SIPS (Surat Izin Penempatan Pelaksana Swasta) tidak diubah menjadi SIP... SIP3MI sesuai janji Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 18, tapi sementara perusahaan yang tidak menyetor dana ... maksud tambah deposito, dicabut izinnya.

Bahwa Yang Mulia ... Yang Mulia Hakim ... Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Keterangan Pemerintah dan Keterangan DPR RI dalam sidang beberapa bulan yang lalu menerangkan bahwa penambahan deposito dari Rp500.000.000,00 menjadi Rp1,5 miliar untuk mengurai pendapatan swasta, tidak terbukti karena selang beberapa bulan PT yang dicabut izinnya kemudian pemilik ... pemilik ini mengajukan permohonan PT baru dan mengubah ... menambah satu kata, dua kata, tentu mengikuti Pasal 4 ... Pasal 54 ayat (1) menjadi model setor dengan Rp5 miliar dan menaikkan deposit Rp1,5 miliar seperti PT terlampir, dicabut (...)

34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pak, tadikan Bapak sudah mengatakan, Bapak pemilik PT yang tidak dicabut izinnya?

35. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ini Bapak menjelaskan yang dicabut izinnya. Itu ... itu berarti bukan pengalamannya Bapak itu. Itu pendapat ... pendapatnya Bapak itu.

37. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Lagi diminta Bapak menjelaskan atau menyampaikan apa yang Bapak alami, gitu.

39. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

He em.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tadi Bapak menanggapi keterangannya DPR ... apa ... itu bukan tugasnya Saksi itu, ya. Tolong yang apa yang Bapak alami, gitu.

41. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia, bahwa dengan adanya ... dengan terbitnya Permen Nomor 1 ... Nomor 1/20, walaupun penambahan deposito Rp1,5 miliar sejak tanggal 18 Maret 2020, sampai saat ini tidak menempatkan ke luar negeri. Artinya, kenaikan deposito itu juga tidak melindungi PMI. Padahal ... walaupun Taiwan dan Hongkong telah menerima PMI dan mengkarantina atas (ucapan tidak terdengar jelas) pendidikan. Jadi semakin jelas hanya mau depositonya, tidak mau melindungi PMI sendiri dan tidak (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa saya sependapat dengan Pemohon Aspataki, walaupun saya bukan anggota Aspataki yang diajukan uji materi Pasal 54 ayat (1)

Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) karena merupakan pasal yang merampas hak (...)

42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sebentar, Pak! Ini Bapak bolak-balik kita sampaikan, ditangkap enggak? Bapak tidak diminta pendapatnya, tapi Bapak diminta menjelaskan apa yang Bapak alami, gitu, sebagai pemilik PT tadi.

43. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Bapak berpendapat sepakat dengan Pemohon, itu bukan pendapat ... bukan porsinya saksi itu, itu porsinya ahli.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon, apa yang dikehendaki dari keterangan Saksi? Silakan! Tanya saja!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mulai pendalamannya saja langsung. Karena itu izinkan kami langsung bertanya kepada Saksi.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Saksi tolong dijelaskan dipersidangan ini. Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 berlaku, Saksi mempunyai perusahaan yang sudah menjalankan usaha penempatan, tadi Saksi sudah mengatakan dicabut izinnya tahun ... yang mau ditanyakan, apakah Saksi pernah mendapat teguran atau peringatan dari pihak yang memberikan pencabutan izin Saksi? Itu pertama.

Kedua, apa yang dialami oleh Saksi setelah pencabutan tersebut? Kerugian apa kira-kira sebagai pelaku usaha dengan dicabutnya izin tersebut?

Demikian, coba dijelaskan!

49. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Bahwa saya tidak pernah mendapat teguran dari Kemenaker, peringatan, dan apa pun yang sebelumnya. Malah surat ... surat pencabutan pun saya tidak diterima. Bahwa tiba-tiba langsung muncul surat pada kedutaan, menyetop seluruh pelayanan PT saya.

Dan setelah saya di ... disetop oleh Kemenaker, tentunya me ... mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak bisa berfungsi lagi, tidak bisa berjalan lagi sesuai dengan yang kita inginkan. TKI kita masih ada, kita masih harus membayar sewa kontrak kantor, membayar karyawan. Nah, itu. Kerugian sangat besar sekali.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Artinya, kerugian yang dialami oleh Saksi, itu secara materi, ya?

51. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Kemudian disamping daripada kerugian yang dialami oleh Saksi sebagai pelaku usaha, pemilik SI PPTKIS, apakah Saksi sekarang sudah berusaha untuk mendapatkan izin yang baru atau menurut Saksi sudah pernah mengajukan izin yang baru sesuai dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dipakai istilah SI P3MI itu?

Kemudian Saksi, disamping Saksi sebagai mengalami kerugian, pihak mana lagi yang mengalami kerugian daripada pencabutan izin yang Saudara Saksi miliki sebelumnya? Terima kasih.

53. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Saya tidak pernah mengajukan izin baru lagi karena ketentuan Pasal 54 adalah menambah sampai dengan Rp1 miliar, ya, tentunya yang ... yang dirugikan kepada saya adalah TKI kami tidak bisa (ucapan tidak terdengar jelas) TKI lagi, sehingga kami tidak bisa berusaha untuk menjalankan usaha macam ... usaha saya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Minta penjelasan, bukan Rp1 miliar mungkin, deposito Rp1,5 miliar?

55. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya, Rp1 miliar ... penambahannya Rp1 miliar.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Penambahan?

57. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya, penambahan Rp1 miliar.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Di dalam hal ini diberikan ... sebenarnya hanya menambah Rp1 miliar?

59. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Adakah teknis yang diberikan regulator dalam ini untuk perusahaan Saudara Saksi?

61. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Tidak ada. Pokoknya harus semua Rp1 miliar saja.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Oke.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup?

64. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan duduk.

Saksi berikutnya, Pak Kusdiono? Ya, silakan!
Ya, Pemohon, langsung saja tanya apa yang dikehendaki dari Pemohon ini ... Saksi ini?

66. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Assalamualaikum wr. wb.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb.

68. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Perkenalkan nama saya Kusdiono.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

70. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Lahir 21 Januari 1953.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

72. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Mantan Pegawai BNP2TKI dan juga pegawai daripada Depnaker.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

74. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Dari tahun 1977. Terima kasih, saya itu saja.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, silakan Pemohon, apa yang dikehendaki?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi minta menjelaskan di dalam persidangan ini, tadi Saksi menjelaskan adalah Mantan Pegawai Depnaker. Mau kita bandingkan, menurut Saksi sebelumnya ... sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berlaku undang-undang nomor berapa dan apa istilah izin yang dimiliki oleh pelaku-pelaku usaha? Kemudian dibandingkan dengan sekarang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut bisakah berjalan dengan baik dan bisakah pelaku-pelaku usaha sebelumnya men ... melakukan pengiriman dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri? Demikian.

77. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Bisa dijawab, Bapak Hakim?

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung!

79. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Baik, terima kasih, Pak Hakim.

Pertama-tama saya beritahukan tentang SIP atau surat izin yang dimiliki oleh perusahaan. Surat izin yang dimiliki perusahaan waktu itu berjalannya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tapi nyatanya sampai sekarang itu masih dipakai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Isinya di situ dinyatakan bahwa setiap perusahaan itu bukan perlindungan, tetapi penempatan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, di situ ada definisi. Bahwa poinnya adalah poin 9 menyatakan bahwa perusahaan hanya sebagai penempatan dan promosi. Tetapi, nyatanya di situ ada di SIP yang ada sekarang yang berlaku dari 316 perusahaan, itu ada seki ... semuanya berlakunya masih Undang-Undang Nomor 39. Sedangkan undang-undang ini memberlakukan kepada 126 perusahaan. Begitu dia lahir, begitu dia mati. Itu yang ada. Itu dari undang-undang. Kenapa? Karena dipaksakan dengan Undang-Undang Nomor 18 ini di Pasal 58, apabila tidak memenuhi persyaratan, maka dia adalah tidak dicabut. Tetapi, tidak melihat review lagi di Pasal 54, Pasal 54 itu adalah persyaratan bagi tenaga ... bagi P3MI yang baru. Persyaratan di situ Pasal 56 mengatakan bahwa Pasal 54 itu adalah syarat daripada administrasi, sehingga apabila tidak terpenuhi, daripada memenuhi ... memenuhi daripada deposito tadi, kok sekarang dicabut. Padahal untuk pencabutan yang salah administrasi itu, mereka

harus mengikuti Pasal 37, dipanggil dulu, dimusyawarahkan dulu, ada peringatan, dan sebagainya, itu yang tidak dilaksanakan tentang SIP.

Lalu yang kedua masalah tentang pelatihan. Pelatihan di sini, mohon maaf, Bapak-Bapak, SKKNI itu sudah berlaku 10 tahun yang lalu, tidak mengikuti perkembangan yang ada di negara prapenempatan. Seperti misalnya saya contohkan di sini adalah bagaimana seorang tenaga kerja yang mau merawat orang tua? SKKNI-nya tidak ada, bagaimana merawat orang tua? Kebetulan saya mempelajari tentang alzheimer, dimana alzheimer itu adalah karena pengerutan daripada otak kita. Dari otak kita mengerut, di situ sudah saya kasih contoh.

Di ayat 68 Yasin dinyatakan ... Surat Yasin dinyatakan, "Apabila kamu saya perpanjang umurmu, niscaya kamu akan saya kembalikan kepada asal mula." Asal mula itu sebagai apa? Sebagai anak-anak. Sehingga tingkah laku daripada orang tua yang lansia yang akan dirawat oleh perawat ini, ya, dia tidak diberikan. Bagaimana cara merawat? Bagaimana cara mendampingi? Sehingga tenaga kerja akan stres. Ini adalah bentuk perlindungan waktu tenaga kerja harus berangkat, sehingga mungkin banyak di media massa tenaga kerja digebukin, ya, karena dia tidak tahu cara merawatnya. Kadang-kadang ada tenaga kerja yang kemarin ada di Taiwan, dia merawat orang tua. Orang tuanya baru ngomong, kena marah, lalu majikannya itu tadi yang dirawat ditendang.

Saya ada satu contoh tenaga kerja yang bisa kebetulannya saya bimbing. Tenaga kerja ini selalu kalau dirawat dipegang-pegang sama majikan, sampai mungkin kepada ... ya, kalau perempuan dipegang yang mana, saya tidak tahu. Saya ngomong, "Kalau kamu nolak pegang tadi, jangan kamu tolak, kamu pegang lagi tangan itu, kamu singkirkan dengan pakai bahasa isyarat. Tolong jangan pegang!" Maka dia tidak megang. Kalau kita kasar si orang tua, orang tua kita sendiri ... mungkin Bapak-Bapak di sini yang memeluk agama Islam hormatilah Ibu, hormatilah Bapak. Kata Nabi tiga kali ibumu, ibumu, ibumu, baru bapak.

Nah, di situlah kita ... kita akan ... semuanya akan menjadi orang tua. Orang tua itu yang akan dibekali (...)

80. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pak ... Pak, yang ada hubungannya dengan (...)

81. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Ya, ini ada hubungannya, Pak.

82. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya.

83. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Ini ada hubungannya dengan pelatihan karena pelatihan itu harus dibekali, Pak. Ini adalah bentuk perlindungan kalau menurut pendapat saya, itu adalah bentuk perlindungan. Ini tidak ada, Pak, kalau kita lihat di SKKNI-nya. Saya kira saya cukupkan segitu saja.

Lalu yang kedua dengan ... dengan adanya job order, Pak. Setelah job order keluar, maka keluarlah namanya SIP (Surat Izin Perekrutan). Mohon maaf, Bapak, tidak semua perusahaan akan berlaku jujur dan tidak semua yang ada di Depnaker saya katakan tidak tahu apa itu job order, apalagi pakai Bahasa Inggris, tidak diterjemahkan.

Ada salah satu contoh, dimana tenaga kerja ini ... eh, dimana PPTKS ini katakan bahwa ini lho job order, lalu dikasihlah job order. Job order itu ada, dibekali SIP, dia berhak merekrut, direkrutlah dia. Karena job ordernya itu bukan pekerja, pertukaran mahasiswa, sehingga dia tidak bisa dikirimkan. Jadi, saya katakan di sini yang mana ... jaminan deposito itu tidak pernah dicairkan selama yang saya alami sewaktu tenaga kerja di luar negeri. Jadi, pencairan deposito itu adanya adalah di setelah prapenempatan, ada penipuan di situ. Kalau dia sudah di sana, mengatakan bahwa ... kemarin saya melihat di situ. Bahwa tenaga kerja nanti pemerintah enggak bisa bayar ini, inilah deposito itu sebagai jaminan. Kami hanya ... saya lihat perusahaan karena tanda tangan PK (Perjanjian Kerja) di situ ada kewajiban dan hak, maka dia hanya kewajiban dan hak hanya itu yang dilaksanakan. Kalau dia melakukan hukum pidana atau melakukan tindak pidana kriminal, itu sudah di luar tanggung jawab daripada P3MI.

Saya kira itu saja yang saya ini kan. Terima kasih.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, ada tambahan sedikit, Yang Mulia. Tadi istilah yang dipakai itu setelah berlakunya ... belakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mau kita minta penjelasan dari Saksi, dahulu pelaku usaha, apa peran dan kewenangannya di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004? Kemudian, dibandingkan dengan tahun ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pelaku usaha hanya terbatas apa sekarang ini?

Berikutnya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, telah dikonsentrasikan pelayanan itu di layanan terpadu satu atap. Menurut Saksi, apa peran daripada layanan ... layanan terpadu satu atap dibandingkan dengan tidak adanya layanan terpadu satu atap sebelumnya? Demikian.

85. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Baik. Terima kasih, Pak.

Undang-undang diber ... Undang-Undang Nomor 39 berlaku adalah mulai merekrut ... mulai dari perekrutan, sampai penempatan, dan sampai pemberangkatan itu semua adalah di ... hak daripada perusahaan. Karena di situ ada yang disebut dengan ... apa ... kalau Pasal 39 ... eh, Undang-Undang Nomor 39 itu disebutkan di situ ada Pasal 1 tentang ... tentang definisi bahwa dia merekrut, mulai direkrut, pelatihan, sampai kepada mengurus dokumen, sampai kepada pemberangkatan itu semua adalah daripada ... tugas daripada PJTKI. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 39 ... eh, Undang-Undang Nomor 18 ... maaf, Yang Mulia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, ya, P3MI hanya menempatkan dan mempromosikan. Sedangkan satu atap di sini, mohon maaf, satu atap ini hanya atapnya saja yang terlihat, tapi semua di situ aparat tidak ada. Aparat di situ hanya naker saja atau mungkin nanti ada imigrasi di situ, mungkin saya lihat di situ ada. Tapi begitu berbuat atau buat ... apa namanya ... paspor, dia harus kembali ke kantor imigrasi.

Jadi, terpaksa si tenaga kerja ... si tenaga kerja itu harus bolak-balik dari kantor satu atap tadi harus pergi ke ... apalagi namanya surat kelakuan baik juga gitu, tidak ada bapak polisinya. Ada polisi, tapi setelah itu didaftar ... di ini, baru diajak ke kantor polisi lagi. Jadi sama saja, tidak ada.

Jadi selama ini, saya rasa satu atap masih belum berjalan dengan baik. Terima kasih.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Cukup, Yang Mulia.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, duduk kembali!

Ya, terakhir, Pak Wisnu, silakan! Ya, Pemohon, silakan langsung, ya (...)

88. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Ya.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Apa yang dikehendaki, ya.

90. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Wisnu Wicaksono. Saya pemilik daripada PT Herotama Indonusa. Pengalaman sudah 22

tahun. Alhamdulillah tidak pernah tersangkut perkara pidana dan perdata. Dan pada Februari ... 24 Februari ini, izin saya dicabut oleh Menaker. Terima kasih.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Kami lanjut, Yang Mulia.
Saudara Saksi (...)

92. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Baik.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Sebagai pelaku usaha dalam pengiriman tenaga kerja sebelumnya dan sekarang ini izinya sudah dicabut, yang kami mau tanyakan, apakah pengalaman atau yang sudah dialami oleh Saksi dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang dikenal dengan pembuatan perjanjian kerja, siapa-siapa pihak yang melakukan perjanjian kerja? Dan apa peran daripada Saksi selaku pelaku usaha di bidang itu? Apakah ada peranannya di dalam perjanjian kerja tersebut? Sehingga, perjanjian kerja itu nantinya setiap ada perubahannya, siapa saja yang bisa mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab?

Demikian. Coba dijelaskan!

94. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Baik, terima kasih. Saya coba jelaskan.

Pada dasarnya, sebagai PJTKI atau P3MI, sekarang kita mencari pasar, mencari pengguna, ya. Kemudian, langkahnya adalah kita membuat perjanjian kerja sama penempatan atau recruitment agreement. Recruitment agreement ini dilengkapi dengan adanya demand letter. Kemudian, perjanjian kerja atau employment contract.

Nah, employment contract ini merupakan transaksi hukum antara calon atau antara PMI tenaga kerja dengan employers atau pengguna. Yang mana, perjanjian tersebut meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sebelum perjanjian kerja itu di-endorse atau disahkan oleh pihak KBRI ataupun KJRI, pihak atas tenaga kerja wajib ataupun harus melakukan verifikasi. Jadi, verifikasi terhadap keberadaan daripada user. Kalau mereka menggunakan agency (mitra usaha) juga verifikasi kepada mitra usaha dan verifikasi juga terhadap syarat-syarat dan kondisi kerja, termasuk gaji, termasuk fasilitas, dan sebagainya. Apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di negara penempatan? Jadi, kalau tidak

matching dengan ketentuan perundangan yang ada di negara penempatan, itu kewajiban daripada adnaker adalah untuk me-reject, menolak perjanjian kerja maupun pengesahan daripada job order.

Jadi, transaksi hukum antara TKI, ya, atau PMI dengan user, kemudian di-endorse, disahkan oleh adnaker, kita sebagai saksi atau yang mengetahui.

Nah, dengan berbekal perjanjian kerja yang sudah di-endorse ini, kita membawa pulang ke Indonesia satu set yang namanya job order tersebut untuk dilakukan pembuatan SIP. Kalau dahulu istilahnya surat izin perekrutan, kalau sekarang SIP2MI. Di situ termasuk juga draf daripada perjanjian kerja.

Kita P3MI atau PJTKI akan bergerak sesuai dengan dokumen-dokumen yang sudah mendapat endorsement atau pengesahan, sehingga tidak mungkin kita lepas daripada satu kesatuan dokumen tersebut. Contoh, kalau di dalam job order-nya, itu ada perjanjian antara ... katakanlah perusahaan saya dengan contoh sebagai misal adalah Samsung Electronics, maka dalam set ... satu set job order tersebut, nanti akan juga mencakup kepada ... apakah si user ini, Samsung ini punya kewenangan ataupun kebenaran mendatangkan pekerja asing kepada negara dia, kemudian juga yang dinamakan kuota? Dan contoh yang lain yang paling utama yang ditanyakan oleh Bapak Lawyer adalah PK (Perjanjian Kerja) atau employment contract. Apakah e ... PK-nya sudah disahkan oleh KBRI? Kemudian akan diverifikasi ulang yang namanya dahulu BNP2TKI. Setelah BNP2TKI me ... merasa yakin, kemudian akan me ... mengesahkan dan diterbitkan di dalam Sisko TKLN.

Jadi, tidak mungkin kita lari daripada draf perjanjian kerja antara Samsung dengan P3MI, TKI. Maka, kalau ada perubahan dalam perjanjian kerja, ini pasti ada pihak lain yang melaksanakannya. Artinya, bukan da ... bukan dila ... bukan dikerjakan oleh P3MI atau PJTKI.

Nah, itu adalah terjadi di luar kekuasaan daripada kami, Pak. Itulah sehingga kalau memang betul-betul ada penyelewengan atau penyimpangan daripada PK (Perjanjian Kerja), kami agak ... agak ... kami sangat sulit untuk melakukan tindakan, Pak. Artinya, kedua belah pihak itu, yaitu antara TKI atau PMI, ya, dengan user, merekalah yang berdua yang akan melaksanakan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan PK, Pak.

Saya kira itu, Pak, yang boleh saya jelaskan.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Sedikit lagi, Yang Mulia.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

97. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Saksi, agar mengetahui juga bahwa Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 82 dan Pasal 85, yaitu sanksi pidana terhadap adanya perubahan terhadap perjanjian kerja. Yang kami mintakan diperjelas oleh Saksi, ditegaskan, pelaku usaha atau P ... PJTKI, apakah dia punya peranan untuk mengubah perjanjian kerja? Demikian.

98. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Amat sangat mustahil. Harus saya pertegas, amat sangat mustahil P3MI atau PJTKI mengubah PK. Contoh, apabila perjanjian kerja tersebut sudah di-endorse, kemudian kita bawa kepada BNP2TKI atau sekarang BP2MI, kemudian mereka mengeluarkan SIP (Surat Izin Perekrutan) dalam proses-proses selanjutnya, itu nanti akan dilibatkan lagi deman letter atau job order, kemudain draf PK (Perjanjian kerja), kemudian nanti ada ... ada paspor daripada PMI, ada visa, dan sebagainya. Dan dilaksanakan secara ... dan kita melaksanakan pakai online, di-upload, dan BP2MI akan melaksa ... melakukan verifikasi terhadap semua dokumen, apakah matching.

Jadi, kalau ada perubahan PK, sangat mustahil karena akan di-reject oleh BP2MI, Pak. Nah, setelah terbang sampai di negara tujuan, seandainya terjadi perubahan dalam isi PK (Perjanjian Kerja) ataupun ada yang menyimpangkan, nah itu terjadi adalah merupakan tindak daripada ... kesalahan daripada antara dua, apakah user (employers) ataukah PMI.

Saya mau kasih contoh yang sederhana. Semisalnya saya punya job order cook (juru masak) untuk sebuah restoran di ... katakanlah Malaysia. Saya semua sudah ikut standar daripada job ... job order dan sebagainya, kemudian PMI-nya berangkat dan semua sudah oke. Sesampainya di sana, tiba-tiba user (employers) mengatakan, "Oh, Anda ternyata tidak cocok jadi cook, Anda cocoknya jadi chef cook." Misalnya. Nah, ini ter ... tetap merupakan sesuatu yang di luar jangkauan saya.

Nah, kala ... karena itu di luar jangkauan kita, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, dalam arti, ya, itu tanggung jawab hukum di antara mereka berdua. Atau sebaliknya, "Oh, Anda ternyata tidak cocok sebagai cook, Anda sebagai asisten cook." Contoh. Itu pun juga kita tidak bisa melakukan apa-apa, itu semua di luar kendali kita, di luar kekuasaan kita. Saya kira itu, kita tidak memiliki kekuasaan.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali!

Ya. Karena DPR berhalangan. Oke silakan Kuasa Presiden, kalau ada pertanyaan. Sudah cukup? Cukup. Baik. Dari Pihak Terkait?

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dari Pihak Terkait ada, Yang Mulia.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dari SBMI dan Migrant.

104. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi sekaligus, ya?

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

106. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk dua Pihak Terkait, silakan! Ke Saksi yang mana dulu?

107. PIHAK TERKAIT: HERIYANTO

Oke, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Izinkan kami ingin bertanya ke tiga Saksi yang hadir hari ini. Yang pertama kepada Pak Zarkasih tadi, ya. Oke, Pak Zarkasih. Tadi Pak Zarkasih mengatakan bahwa telah menempatkan 3.500, kalau boleh ingin saya ingin tanya, Pak, tadi saya tidak melihat ... mendengar dengan jelas, Pak Zarkasih ini nama perusahaannya apa, Pak? Oke.

Yang pertama adalah nanti bisa disampaikan ke kita nama perusahaannya. Kemudian, tadi menempatkan 3.500 itu ke negara mana saja? Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah tadi Pak Zarkasih juga menyampaikan terkait dengan kerugian materi, ya, Pak, ya? Terkait dengan ... apa itu ... soal izinnya dicabut. Pertanyaan saya adalah apakah pada jelang waktu Januari tahun 2020, pada saat itu kalau enggak salah di bulan Februari pada cabut, ya, Pak, ya? Apakah di jelang waktu Januari

tahun 2020 sampai hari ini Bapak masih ada menampung calon pekerja migran Indonesia di PT Bapak? Itu pertanyaan buat Pak Zarkasih.

Pertanyaan yang kedua mohon izin, Yang Mulia, kepada Bapak KUSDIONO. Tadi Bapak KUSDIONO menyampaikan bahwa pernah bekerja di BNP2TKI dan di Depnaker. Pertanyaan yang pertama, posisi Bapak KUSDIONO di BNP2TKI seperti apa? Di posisi apa? Kemudian di Depnaker seperti apa? Di posisi mana?

Kemudian pertanyaan yang kedua. Dan sekarang Pak KUSDIONO itu bekerja di mana? Karena tadi Pak KUSDIONO menyampaikan bahwa ada peran dari LTSA yang kurang maksimal. Apakah Pak KUSDIONO sebagai sekarang juga ... kerja di (suara tidak terdengar jelas) ini juga perlu dijelaskan Pak KUSDIONO. Karena LTSA adalah mandat daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Nanti Pak KUSDIONO bisa menyampaikan itu.

Yang kedua adalah tadi Pak KUSDIONO menyampaikan soal tidak maksimalnya terkait dengan ... apa itu ... kalau tidak salah, kalau enggak salah dengar adalah sanksi bagi PJTKI. Pertanyaan saya adalah apa yang dilakukan oleh BNP2TKI pada saat itu, masih Pak KUSDIONO ada, untuk perusahaan-perusahaan yang melanggar? Ada dua pertanyaan ... tiga pertanyaan, Pak KUSDIONO.

Izin, Yang Mulia, sekaligus bagi Saksi yang ketiga, tadi ... mohon izin tadi lupa mencatat nama, Pak? Dengan Saksi ketiga? Pak WISNU. Oke, mohon izin, Pak WISNU. Yang pertama adalah Pak WISNU tadi bahwa bulan Februari izin perusahaannya telah dicabut oleh Menaker, saya ingin tanya, apakah setelah dicabut juga masih menampung, merekrut dengan perusahaan yang sama?

Kemudian yang kedua adalah tadi Pak WISNU juga mengatakan bahwa perusahaan Bapak, kalau tidak salah dengar, tidak bertanggung jawab apabila ada pekerja yang dikirimkan oleh perusahaan Bapak, sengketa dengan majikan terkait dengan perjanjian kerja. Pertanyaan saya, apakah mekanisme sebelum perjanjian kerja yang namanya perjanjian penempatan antara calon pekerja migran Indonesia dengan perusahaan Bapak sudah dilaksanakan? Karena itu salah satu yang bisa mengikat hubungan hukum antara calon pekerja migran Indonesia dengan perusahaan Bapak. Ini yang perlu kami pertanyakan.

Kemudian, pertanyaan yang kedua. Mungkin Bapak nanti bisa sampaikan selang waktu 2018 sampai dengan tahun 2019, apakah perusahaan Bapak juga masih menempatkan? Kalau boleh tanya, apakah ada pekerja migran yang ditempatkan oleh perusahaan Pak WISNU itu pernah mengalami persoalan? Kalau ada, berapa jumlah persoalan yang terkait dengan kontraktual dan bagaimana penyelesaiannya antara Bapak dengan pemerintah soal kontraktual? Apakah itu sudah dilakukan dengan baik?

Mungkin itu saja, izin, Yang Mulia. Terima kasih.

108. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pemohon dulu, ya, sebentar. Yang Anda maksud untuk Pasal 82, Kuasa Hukum, ya, dan Pasal 85 itu *orang tersebut* itu siapa sesungguhnya? *Orang tersebut (...)*

110. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik.

111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

"Supaya diperlakukan bersyarat termasuk orang tersebut." Itu siapa?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Orang tersebut adalah orang yang terkait dengan perjanjian kerja, boleh BPJTKI atau pengurus daripada perusahaan.

113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk TKI-nya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Tentu itu.

115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk TKI. TKI-nya kan memang sudah ter-cover di situ.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul.

117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pekerjaan iklan itu, kan?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, *orang tersebut* itu maksudnya siapa yang tidak (...)

120. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Justru itu, Yang Mulia. Undang-undang tersebut tidak ada dijelaskan penjelasannya demikian, kan itu kita ajukan. Apakah ini menjadi penafsiran bebas? Bolehkah setiap orang ini, termasuk PPJTKI (...)

121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya kan begini, Anda itu kan hari ini mengajukan Saksi-Saksi, itu mestinya stressing-nya pada pemberlakuan syarat orang tersebut itu supaya dijelaskan Para Saksi ini di persidangan. Siapa sesungguhnya pihak-pihak yang enggak ter-cover di dalam perjanjian itu, yang kemudian Anda masukkan ke dalam cluster *orang tersebut*? Ada, tidak, ada subjek hukum yang tidak ter-cover di Pasal 82 dan 85 itu? Pertanyaannya ke Para Saksi sesungguhnya stressing-nya di situ, di samping 54 soal dana tadi. Ini kemudian kan ... sekarang pergeserannya pada lebih ... penekanannya ke yang lebih signifikan kan soal perjanjian yang tidak melibatkan *orang tersebut*. Kalau TKI-nya saya lihat memang normanya sudah melibatkan pekerja migran ... migrannya. Migran, ya?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya.

123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi persoalannya adalah *orang tersebut* itu siapa? Nah, itu ya ... tapi nanti saya ... itu hanya saya akan mengacu untuk menanyakan ... untuk jadi acuan saya untuk menanyakan kepada ... saya mau random ke Pak Wisnu, ya. Pak Wisnu, itu Pak Wisnu Wicaksono itu siapa sih sebenarnya ada pihak yang dimaksudkan oleh Pemohon yang tidak ter-cover di dalam ketentuan undang-undang itu? Kemudian yang sesungguhnya penting, tapi tidak termasuk dalam perjanjian. Ada, tidak?

Yang kedua Pak ... siapa, Pak yang dari Depnaker? Bisa nanti ditambahkan juga, Pak, ya. ada tidak subjek hukum atau pihak yang sesungguhnya penting untuk dimasukkan dalam perjanjian, tapi selama ini tidak dimasukkan? Sehingga itulah ke ... apa ... mengganggu esensi

daripada perlindungan pekerja migran itu, dampaknya, bisa berdampak ke sana. Itu yang dimohon Pemohon, sesungguhnya itu. Ada, tidak? Relevansinya apa? Hubungan hukumnya apa juga? Nanti tolong diterangkan itu saja, sehingga itu penting ditarik sebagai pihak dalam perjanjian itu, kalau ada. Kalau tidak, Mahkamah kan perlu mau tracking ini. Perlu enggak orang-orang yang tidak ada kepentingan hukumnya kemudian ditarik harus dimasukkan dalam cluster *orang tersebut* dalam norma Pasal 82 dan 85. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Gini, saya ke Pak Zarkasih dan Pak Wisnu ini karena sama-sama pemilik perusahaan, ya.

Ini kan keduanya sudah dicabut izinnya, ya, SPPTKIS-nya, sudah dicabut, ya. Kalau Anda baca di dalam pencabutan itu, apakah disebutkan di situ alasan pencabutannya? Coba, nanti di ... anu ... ya, diuraikan. Ada tidak alasan pencabutan di situ? Kalau ada, apa alasan pencabutannya itu?

Kemudian yang pertama itu, ya. Itu ada kaitannya dengan nanti ... apa ... izin SPPTKIS-nya. Apakah dalam izin yang pertama, SPPTKIS itu, itu disebutkan dengan jelas sampai dengan tanggal berapa izin itu diberlakukan? Tadi menyebutkan memang tadi ada yang dari Pak Wis ... Pak Zarkasih, ya, sampai 2022. Apakah itu memang tertera dengan jelas di dalam izin tersebut? Ya, itu penting itu, ya. Apakah tertera? Kemudian, apa kemudian alasan kemudian dicabutnya juga tertera di dalam pencabutan itu? Apa kemudian bentuknya dari pencabutan itu? Apakah berupa surat ... SK pencabutan, ya, atau berupa apa untuk pencabutan itu, ya?

Kemudian yang berikutnya, kepada Pak Kusdiono, ya. Tadi kan Pak Kusdiono mengatakan bahwa ini terjadi karena ... terjadi pencabutan itu karena tidak digunakannya Pasal 37. Gitu, ya, Pak Kusdiono, ya? Tadi kan bilang begitu tadi. Pak Kusdiono sudah memahami belum isi Undang-Undang Nomor 18 itu, Pasal 37?

Pasal 37 itu, Pak, ini saya bacakan, ya, itu sanksi administratif itu, itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, dan pencabutan izin. Itu tidak ada kaitan dengan Pasal 54, Pak, itu berkaitan dengan penempatan PMI yang tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan. Itu satu, Pak, ya.

Kemudian yang lainnya, ini berkaitan dengan tidak melaporkan data keputungan. Dan kemudian Pasal 27-nya itu berkaitan dengan ...

satu, data kepulangan, kemudian berkaitan dengan kepulangan migran Indonesia yang terjadi karena tidak sesuai dengan perjanjian itu. Nah, di mana kemudian itu tadi menyebutkan berkaitan dengan Pasal 37 ketika terjadinya pencabutan itu? Di mana, Bapak? Ini kan dari BNP2TKI. Dari mana dasarnya itu, Pak? Kok bisa mencabut hal itu didasarkan pada Pasal 37? Memang ada Pasal 37 menyebutkan, "Pencabutan," tetapi tidak berkaitan dengan modal disetor, termasuk deposito dan yang bisa diambil setiap saat itu. Itu tidak ada kaitannya di situ, Pak, ya. Itu satu, ya, itu untuk Pak Zarkasih[Sic!].

Kemudian yang berikutnya ke Pak Zarkasih[Sic!], apakah karena Pak Zarkasih ... Pak KUSDIONO, ya. Pak KUSDIONO, ini Pak KUSDIONO pensiunnya kapan ini?

126. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Awal 2009.

127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Awal 2009. Kalau begitu, belum berlaku undang-undang ini, ya.

Saya pertanyaannya kepada Pak Zarkasih dan Pak Wisnu saja, apakah ada perusahaan-perusahaan lain selain yang dimiliki oleh kedua ini, yang juga memiliki ... yang modal disetornya adalah Rp500.000.000,00 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39, yang kemudian mengalami kondisi dicabut, ya? Ada, tidak itu?

Apakah kemudian perusahaan-perusahaan ini mengikuti ... saya enggak tahu nanti, apakah di situ bentuknya untuk kemudian memperbaiki perusahaannya, tadi kalau tidak salah di dalam keterangan dari Pak Zarkasih itu ada, yang kemudian namanya diganti sedikit, kemudian dia menyetorkan dengan menambah Rp1 miliar itu, tapi kalau Pak Zarkasih kan tidak menambah Rp1 miliar, ya, kan? Sudah selesai perusahaannya. Tapi apakah kemudian mereka mengikuti untuk menambahkan Rp1 miliar itu? Itu apakah ada yang seperti itu?

Jadi, tolong nanti di ... apa ... diberikan tambahan keterangan sebagai Saksi, ya, apakah ada yang kemudian selain dua ini ada yang kemudian juga mengalami nasib yang sama dilakukan proses pencabutan di situ, ya? Itu.

Kemudian yang berikutnya... saya kira itu dulu, ya. Karena sudah tercakup semua. Terima kasih, Pak Ketua.

128. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Para Saksi untuk menanggapi tanggung jawab dari beberapa pertanyaan. Dimulai dari Pak Zarkasih dulu. Silakan!

129. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Menjawab pertanyaan Pihak Terkait. PT saya namanya PT Asfiz Langgeng Abadi yang telah menempatkan 3.500 dari CTKI (ucapan tidak terdengar jelas), yaitu ke Taiwan, Malaysia, dan Brunei.

Saya kira untuk sejak dicabut SIP saya mulai Februari sampai sekarang, kami tidak menampung, merekrut lagi. Apalagi dengan adanya Kepmen Nomor 151 yang memberhentikan sementara pengiriman TKI ke luar negeri. Jadi, saya katakan bahwa sejak Februari 2016 sampai 2020, sampai sekarang, kami sudah tidak merekrut dan menampung CTKI lagi, itu. Itu yang terkait ... itu, ya. Jadi, saya terangkan itu.

Yang ... yang kedua, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami jawab pertanyaan dari Majelis Hakim. Bahwa izin saya adalah dicabut sejak tanggal 20 Maret 2020, izin saya tertera di dalam izin itu tanggal 10 Maret 2022, memang tertera langsung di dalam izin penempatan itu. Lima tahun sejak dikeluarkan, yaitu 17 ... tahun ... kalau enggak salah tahun 2017 sampai 2022, gitu. Jadi, ya, tertera sekali itu dalam surat izin penempatan kami, Pak.

Yang kedua, dengan apa alasan dicabut ... dicabut karena izin saya? Maaf, saya sampai sekarang pun belum menerima surat pencabutan, hanya tahu dari diskorsing dari ... ke KBRI, pencabutan sementara belum diterima, sehingga saya tidak bisa membaca secara detail apa alasan Depnaker mencabut saya dan kalau sudah jelas ... kalau enggak salah alamat tersebut adalah hanya Anda tidak bisa menyeter Rp1 miliar saja.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak Zarkasih. Karena belum menerima secara tertulis, itu kemudian Anda hanya melihat ada skorsing?

131. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya, ya, betul.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Skorsing itu di mana ditempatkan?

133. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Dikirim ke seluruh perwakilan RI dan ke BP2MI.

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Termasuk ke Saudara juga dikirim?

135. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya, termasuk nama list-nya 102-113 PT yang diskorsing itu.

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada sekitar sekian ratus yang diskorsing?

137. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah di dalam surat itu ada alasan bahwa diskorsingnya karena apa?

139. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya, alasannya jelas tidak bisa menyetor dana Rp1 miliar.

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk sekian ratusnya disebutkan begitu?

141. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Ya, disebutkan sama.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

143. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan lanjut! Kalau ... sudah cukup?

144. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Sudah cukup, saya kira sudah cukup.

145. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

146. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Saya kira yang lain, masalah yang lain banyak sekali, selain PT saya dan PT Pak Wisnu adalah ... ada 126 PT yang dicabut, yang tidak ada menyeter Rp1 miliar itu, dan ada satu PT, satu orang PT yang dengan menambah ... mengubah nama PT, umpamanya nama PT Jabung Perkasa dan PT Jabung Persada dengan menyeter dana Rp1,5 miliar, maka izinnnya dikeluarkan menurut ke ... menurut Pasal 54 ayat (1) itu.

147. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Cukup, ya? Lanjut ke Pak Kusdiono!

148. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Baik, terima kasih, Pak Hakim. Saya hanya menjawab pertanyaan teman saya dari SBMI. Kebetulan saya bekerja di Kemenaker itu di bagian penyelesaian permasalahan. Jadi, bagian penyelesaian masalah. Sejak saya masuk di situ namanya dulu namanya Pusat AKAN (Antar-Kerja Antar-Negara) sampai kepada Binapenta, sampai kepada kembalikan lagi ke BNP, begitu pertanyaan ... jawaban saya.

Lalu STLK kenapa belum maksimal? Di situ memang belum ada, hanya dari naker yang ada, dari 42 kalau enggak salah dari yang ada, tapi sekarang belum berjalan. Lalu sanksi apa? Sewaktu saya bekerja di situ, sanksi apa itu adalah sanksi tentang adalah bagaimana tenaga kerja yang tidak bisa diberangkatkan tadi, saya sudah ulangi tadi, itu dimana dia tidak bisa memberangkatkan karena dia pakai visanya bukan visa kerja, tapi adalah visa yang disebut dengan mahasiswa. Di situ contohnya ada di tulisan saya. Saya datang ke tempat kedutaan, saya tanya, "Ini H2, kalau H2 itu bukan pekerja, tetapi adalah pertukaran mahasiswa." Sehingga, ada sekitar 132 calon tenaga kerja tidak bisa diberangkatkan. Lalu, kita minta kepada Kemenaker dengan surat rekomendasi dari kepala BNP2TKI, maka kita minta dicairkan. Berarti pencairan itu bukan waktu tenaga kerja bekerja di sana, tetapi waktu prapenempatan yang banyak terjadi. Saya kira itu.

Pertanyaannya dengan Bapak Suhartoyo. Memang ada beberapa, Pak. Waktu penandatanganan perjanjian kerja, ya, waktu saya di pusat AKAN dulu, yang menyaksikan itu adalah pegawai pengawas, tahu tentang apa isi daripada yang disebut dengan hak ... kewajiban dan hak tenaga kerja. Dia diberitahu informasi dulu, "Ini lho hak-hak kamu, ini lho kewajiban kamu." Lalu, dia mengetahui ... atas nama dinas tenaga kerja

dia mengetahui sebelum tanda tangan tenaga kerja. Jadi, dari dinas tenaga kerja dan memang protapnya di dinas tenaga kerja. Tetapi sekarang tidak, BNP2TKI tidak ada yang namanya pegawai pengawas. Saya waktu itu mengusulkan terus-terusan. Karena saya mengusulkan begitu, mungkin yang tanda tangan yang lain, tetap saja berjalan seperti itu. Saya sudah mengingatkan bahwa ada satu job order yang istilahnya diformalkan, padahal itu tenaga kerja rumahan, "Ini bukan," saya bilang. Resiko saya adalah dikeluarkan dari kegiatan itu. Oke, enggak masalah, bagi saya tenaga kerja saya bela. Di situlah, Pak, mungkin keterkaitan saat ini penandatanganan perjanjian kerja bukan di depan tenaga Disnaker yang mengetahui tentang perjanjian ... isi perjanjian kerja. Saya kira itu.

Lalu, dengan Bu Enny, mohon maaf, Bu, saya tadi katakan bahwa Pasal 37 itu (...)

149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak, sebentar, Pak.

150. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Siap!

151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang saya tanya tadi, apakah pengawas itu juga diwajibkan untuk terlibat dalam perjanjian? Sehingga keinginan Pemohon untuk dimasukkan dalam norma atau aturan Pasal 82, 85 itu ada pihak maupun *orang tersebut* itu maksudnya apakah pengawas itu yang dulu ada sekarang tidak ada. Kalaupun ada, apakah perlu juga dilibatkan dalam perjanjian?

152. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Dilibatkan itu waktu dia mau tanda tangan itu kita informasikan.

153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dalam perjanjian ikut tanda tangan, tidak?

154. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Ada.

155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

156. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Ada.

157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang dulu?

158. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Dulu.

159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekarang?

160. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Tidak ada.

161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada.

162. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Pegawai BNP2TKI.

163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hubungan hukumnya apa sebenarnya orang itu ... pengawas itu dengan apa ... konteks perjanjian itu? Kalau sekadar itu sebenarnya hanya memberikan pengawasan bahwa itu ada hak-hak calon tenaga kerja Indonesia itu yang harus diketahui. Kemudian kalau sekadar menjelaskan itu, kenapa dia harus ikut tanda tangan, Pak? Esensi yang relevan di mana waktu itu, Pak? Sekarang enggak ada itu. Nanti juga itu saya akan mintakan konfirmasi ke Kementerian Tenaga Kerja, Pak. Ketua, saya mohon izin juga. Apa yang disampaikan Saksi yang pertama tadi bahwa dari Depnaker, ya, khususnya, ya, ada berapa ratus perusahaan, Pak?

164. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

126.

165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu di keterangan kemarin sudah dimasukkan, Pak? Benar, tidak bahwa ada yang dicabut tanpa alasan yang ... ada yang menurut Saksi ini tidak ... apa ... tidak seperti yang ... karena ada persyaratan-persyaratan yang tidak diduga yang kemudian ... bahkan ada yang belum menerima surat keputusan segala macam. Tolong nanti kalau di kesimpulan ditambahkan! Izin melalui Pak Ketua. Itu, ya, Pak. Nanti sekalian, ya, Pak dari Depnaker, benar tidak, keterangan Saksi ini bahwa ada pihak yang ... kalau menurut undang-undang yang dulu katanya, "Pengawas itu masuk dalam frame perjanjian, tapi yang sekarang tidak." Nanti saya akan ... kami akan cross ke ... bisa ... enggak Anda bawa, ya, contoh perjanjian itu, ya? Pemohon ada enggak dilampirkan bukti itu, Pak?

166. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Enggak bawa.

167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tolong ya nanti di kesimpulan, Pemohon lampirkan dalil Anda itu ini perjanjian lama yang melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas ada ikut tanda tangan, sehingga tidak ada persoalan dengan norma itu, tapi undang-undang yang sekarang tidak. Maunya kan gitu, Pak Kus, ya?

168. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Siap, Pak.

169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau kami penting bukti itu kalau tidak, ya, Bapak memberi keterangan di persidangan tidak sesuai dengan fakta juga ada sanksinya, Pak. Hati-hati juga. Terima kasih, Pak Ketua.

170. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ya, silakan.

171. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Masih bisa saya teruskan?

172. KETUA: ANWAR USMAN

Ya masih, kalau masih ada, silakan!

173. SAKSI DARI PEMOHON: KUSDIONO

Ibu Enny tadi. Ibu, saya hanya me-review tentang Pasal 39 ... 37 itu bahwa setiap akan melakukan ... bahwa itu adalah sanksi administrasi kembalikan kepada Pasal 56, tetapi perusahaan yang akan dicabut ini tidak melalui prosedur. Misalnya dipanggil dulu, lalu dikasih teguran tertulis, setelah itu istilah saya diskorsing. Itu tidak ada melakukan itu.

Jadi saya me-review ke 37 itu hanya itu, Ibu. Terima kasih.

174. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terakhir, Pak Wisnu, silakan! Miknya.

175. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Halo. Terima kasih, Yang Mulia. Saya pertama pertanyaan daripada Pak Heriyanto kalau enggak salah, Pak SBMI. "Apakah setelah izin dicabut masih merekrut?" Jelas, tidak. Karena dalam keputusan pencabutan izin kita tidak boleh lagi merekrut, tetapi kita masih bisa proses selanjutnya setelah mempunyai ID, Yang Mulia. Artinya, setelah punya ID, PMI atau TKI itu masih bisa kita proses.

"Apakah masih menampung?" Bagi yang sudah ada ID dan masih dalam proses kelanjutan, memang kita lakukan penampungan, itu memang dibenarkan oleh surat edaran daripada dirjen, penjelasan daripada kepmen pencabutan, ada keluar surat edaran dirjen.

Kemudian, pertanyaan selanjutnya mengenai perjanjian penempatannya, Pak Heriyanto, ya. Memang betul perjanjian penempatan itu adalah mengatur antara kami dengan calon PMI, di situ memuat hak-hak dan kewajibannya. Kebetulan saya bawa contoh daripada perjanjian penempatan yang dikeluarkan oleh Permenaker Nomor 9 Tahun 2019. Meskipun Permenaker Nomor 9 ini di ... istilahnya ditangguhkan oleh surat edaran menaker per tanggal 16 Oktober, tapi sebagai informasi saja bahwa memang kita pihak P3MI wajib melindungi pihak calon PMI dan sebagainya, kemudian menyediakan sarana prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan. Ini draft daripada PP, memang kita wajib meskipun ini bertentangan juga dengan undang-undang ... menurut kami, Pak, dengan Undang-Undang Nomor 18 Pasal 1 angka 9, kami tidak lagi

wajib memberikan perlindungan kami hanya wajib memberikan pelayanan penempatan.

Jadi, banyak yang bertabrakanlah dalam PP rencana draft PP-nya. Kita juga wajib membantu pengurusan dokumen dan sebagainya, kemudian dalam 3 bulan harus ditempatkan, seandainya 3 bulan tidak ditempatkan, kita harus memberikan penjelasan dan sebagainya. Itu draft PP. Mungkin Pak Heriyanto yang bisa saya jawab mengenai PP antara P3MI dengan calon PMI.

Kemudian, pertanyaan Yang Mulia Hakim Bapak Suhartoyo, "Apakah ada atau bagaimana penjelasan yang *orang tersebut* menjalaninya?" Itu yang dalam usulan Pemohon. Dalam pemahaman saya, kalau ada perubahan PK, Pak, itu harus ada penandatanganan ulang antara si PMI dengan majikan di sana, kemudian dilaksanakan di KBRI, disahkan oleh (...)

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sejak awal itu, Pak, yang dimaksudkan, Pak.

177. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Ya, Pak.

178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 82, 85 itu perjanjian yang tidak dikaitkan dengan PK (...)

179. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Oh.

180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perubahan PK, tidak. Dalam perjanjian yang asli pun ada enggak pihak yang seharusnya dilibatkan (...)

181. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Tapi terlewatkan?

182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak dilibatkan. Itu yang (...)

183. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Pertanyaan, Yang Mulia Hakim, kalau menurut saya semua sudah tanda tangan, Pak. User tanda tangan, TKI atau PMI tanda tangan, kemudian saksinya diketahui oleh PJTKI, P3MI, dan di-endorse oleh KBRI, Pak.

184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Semua tanda tangan?

185. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Jadi, menurut saya semua sudah tanda tangan. Yang jadi masalah, Pak, perjanjiannya ... contoh yang ... yang sederhana. Perjanjiannya sebagai cook, contoh saja, Pak. Sesampainya di sana, user nakal, "Ah, kamu enggak cocok jadi cook, kamu cocoknya asisten cook saja." Nah, ini yang berbahaya adalah kalau terus turun pangkat, turun gaji, Pak. Tentu PMI-nya marah dan dia akan melakukan pengaduan kepada KBRI.

Nah, dalam hal ini, kalau terjadi hal-hal seperti itu, jelas di luar daripada kami, Yang Mulia. Kalau memang mereka mau berubah, monggo silakan, antara TKI dengan user, disahkan oleh KBRI, dan dengan pengetahuan kami juga, tapi ini kan tidak terjadi begitu, Yang Mulia. Itu mungkin yang menjawab kepada Yang Mulia Bapak Suhartoyo.

Kemudian, menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Enny. "Alasan dicabut apa si ... apa sih kira-kira, gitu, ya?" Kalau saya, kebetulan terima Kepmenaker pencabutan izin usaha saya. Memang di dalam pencabutan izin usaha saya yang disebutkan adalah karena tidak ... yang bahasa sederhananya tidak membayar deposito, tapi di sini disebutkan karena (...)

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Wisnu!

187. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Inggih, Bu.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu sudah dijadikan ... anu ... belum? Bukti oleh Pemohon belum?

189. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Ada. Saya lampirkan (...)

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada?

191. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Saya lampirkan di dalam lampiran 4, Bu. Kepmen ... untuk perusahaan saya adalah Kepmenaker Nomor 67 Tahun 2020. Jadi, alasannya adalah perusahaan P3MI saya tidak ... tidak menyesuaikan persyaratan SI P3MI sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 dan juga Pasal 7 Permen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tatacara Pemberian Izin Perusahaan.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Perusahaannya Pak Wisnu itu sampai kapan, Pak, berakhirnya, Pak? Di dalam (...)

193. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Yang menjadi masalah, izin saya ini masih berlaku hingga 30 November 2021 dan di dalam Kepmenaker 458 Tahun 2016, izin saya, itu tidak ada satu klausul pun yang mengatakan izin usaha saya ini bisa dicabut setiap saat. Jadi memang saya bersih keras izin saya masih hidup. Sehingga saya pun membawa masalah ini kepada PTUN. Kebetulan, ada 11 yang sudah confirm membawa ke PTUN dan dua lagi masih surat keberatan di presiden untuk memohon keberatan ... apa ... atas pencabutan SI PPTKI kami. Jadi, tidak ada satu pun klausul dari pada Kepmen 458 Tahun 2016 tentang izin kami yang membenarkan langkah-langkah Kemenaker untuk mencabut izin secara sewenang-wenang. Itu pertanyaannya kepada Yang Mulia Ibu Enny, mengenai alasan pencabutan dan sampai kapan izinnya. Kemudian, apakah alasannya tertera (...)

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, Pak. Pak Wisnu.

195. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Ya.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau modal disetornya, Pak Wisnu, masih pakai yang Rp500.000.000,00 ya? Yang dulu, ya?

197. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Mohon maaf, Yang Mulia. Modal disetor adalah Rp3 miliar.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Rp3 miliar?

199. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Kalau deposito adalah Rp500.000.000,00.

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Rp500.000.000,00 itu, ya?

201. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Ya.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu masih ... masih utuh deposito Rp500.000.000,00 itu?

203. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Masih. Sebab semenjak tahun 2006 pada waktu Undang-Undang Nomor 39 ini diimplementasikan, saya sudah setor Rp500.000.000,00.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai akhirnya kemudian ada pencabutan itu (...)

205. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Masih, masih, Yang Mulia.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Belum pernah digunakan?

207. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Dan alhamdulillah tidak pernah dikutik-kutik sama sekali karena memang tidak pernah ada. Dan setahu saya, kasus-kasus yang terjadi, yang mencairkan deposito, itu mungkin semuanya, ya, atau hampir semuanya adalah kasus semasa ataupun sesudah penempatan, Yang Mulia.

Kalau boleh saya jelaskan begini, Yang Mulia. Kasus-kasus itu adalah terjadinya di saat pra, yaitu pada waktu dahulu P3MI atau PJTKI merekrut, merekrut, merekrut, kemudian ambil duit, duit, duit, dan ternyata job order-nya palsu atau aspal, dan sebagainya, dan sebagainya, sehingga terjadinya di wilayah kita, di wilayah Indonesia.

Nah, disitulah terjadi yang banyak kasus untuk pencairan deposito. Saya enggak tahu, apakah kasus ... ini sebagai contoh, Yang Mulia, ABK ... ABK di kapal Cina yang sedang berlabuh di Korsel, yang mana ada pelarungan jenazah, apakah ini mencabut juga ... apa ... mencairkan juga deposito. Karena itu sangat ... sangat ... apa ... tidak jelas. Bahkan yang saya dengar, tidak melalui P3MI. Satu melalui P3MI, tetapi dia mengundurkan diri. Jadi sudah tidak lagi P3MI, tapi orang perorangan yang memberangkatkan.

Jadi kasus pencairan deposito di luar negeri, menurut sepengetahuan saya, hampir tidak pernah ada.

Jangan bicara soal uang diat, Yang Mulia ... mohon maaf, satu uang diat untuk satu uang darah itu mungkin Rp25 miliar dan sebagainya. Ini semua kasus-kasus di luar tanggung jawab P3MI. Kasus-kasus pidana yang merupakan tanggung jawab pribadi PMI atau TKI dan tidak ada hubungannya dengan profesi kita sebagai PJTKI.

Barangkali itu, Yang Mulia, yang boleh saya ... kemudian, adakah perusahaan lain yang modal disetor atau mungkin per ... pertanyaan Yang Mulia adalah yang tidak bayar deposito lah. Kalau boleh saya jelaskan, Yang Mulia, memang semuanya yang di ... adalah yang tidak menambah atau, ya, menambah pembayaran deposito Rp1 miliar lagi, tapi yang anehnya ... kalau boleh saya menambah lagi informasi, Yang Mulia, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini syaratnya bukan hanya deposito, tapi ada penambahan modal disetor dari Rp3 miliar menjadi Rp5 miliar.

Saya banyak memiliki informasi dari kawan-kawan, mereka pun tidak menambah modal disetor, tapi tidak dicabut izinnya. Bukan saya iri atau meri kepada mereka yang tidak dicabut izin, tapi kenyataannya Depnaker ini melakukan tindakan yang ambigu. Artinya, double standard, kenapa hanya yang tidak bayar deposito, padahal persyaratan untuk mendapatkan izin yang baru itu bukan hanya deposito. Di Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) kalau enggak salah itu harus punya ISO di permenaker ... saya rasa harus ada sarana/prasarana. Kemudian selain deposito, modal disetor, laporan keuangan yang tidak rugi dalam 2

tahun. Nah, ini dibongkar ini sebenarnya ramai juga, Yang Mulia. Artinya, (...)

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak. Bapak ada buktinya, tidak? Kalau ada buktinya, sampaikan saja kepada Pemohon.

209. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Saya tidak membawa buktinya, tapi ... sebenarnya dengan WA, dengan sebagainya, tapi secara hitam di atas putih tentunya sulit bagi saya, Yang Mulia. Tapi adalah kawan-kawan yang tidak menambah modal disetor, toh juga tidak dicabut. Jadi, artinya yang dikejar itu hanya yang bayar penambahan Rp1 miliar. Hanya Rp1 miliar, "Yang penting kamu bayar, kamu selamat."

Meskipun izin kita masih hidup sampai ... ada kawan saya 2024, Bapak ... PT SKM itu sampai 2024 izinnya, Yang Mulia, tapi tetap dicabut juga. Ya, kebetulan juga kami sedang membawa masalah ini di PTUN, Yang Mulia, kenapa hanya masalah deposito saja yang dikejar, dikejar, dikejar, tetapi yang lain seolah-olah diabaikan oleh Kemenaker, termasuk yang apakah punyai NIB. Sebab di Permen Nomor 10 itu harus punya NIB, harus ada ISO, harus ada beberapa persyaratan-persyaratan lain, itu tidak dilihat sama sekali. Dan tragisnya, Yang Mulia, kami yang tidak bayar deposito diterapkan Undang-Undang 18 secara murni dan konsekuen, artinya terus meninggal, cabut SIP-nya. Tapi yang membayar deposito tidak dapat apa-apa, tetap pakai SI PPTKI yang notabene adalah ilegal. Saya boleh bersikeras mengatakan 316 P3MI yang ada ini sekarang statusnya ilegal karena mengandalkan izin berdasarkan undang-undang ... almarhum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini tragisnya.

Jadi, izinnya masih izin yang lama, masih ilegal, tapi diberi surat edaran oleh direktur atas nama dirjen, mereka masih sah, masih aktif, padahal tidak ada izinnya.

Ini yang boleh saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Izin, Pak Ketua, saya ke Menaker, ya. Tolong nanti permenaker yang baru-baru yang terkait dengan satu, Pasal 54, termasuk juga sanksi administratif tadi karena itu ditentukan kemudian pendelegasiannya ke permenaker. Ya, tolong itu juga disampaikan, ya! Terima kasih.

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Mohon izin, Yang Mulia, kalau diberi kesempatan dari Migrant Care ada belum sempat memberikan pertanyaan, Yang Mulia.

212. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi kan sudah tadi.

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ada sedikit tambahan dari, Migrant Care jika diberikan kesempatan.

214. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, satu pertanyaan. Silakan!

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

216. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi Pihak Terkait dari Serikat Buruh Migran Indonesia, saya Anis Hidayah dari Migrant Care. Saya ingin mempertanyakan kembali pertanyaan dari rekan kami ... apa ... Serikat Buruh Migran Indonesia yang belum dijawab oleh Saksi dan ini sangat terkait dengan ... apa ... pasal yang diajukan baik ke Pak Zarkasih, Pak KUSDIONO, maupun Pak Wisnu.

Jadi, dari ... apa ... pengalaman 22 tahun menempatkan pekerja migran, tadi dari Pak Zarkasih, 3.500, apakah terkait dengan Pasal 82 dan Pasal 85 terkait dengan perjanjian kerja, pekerja migran yang diberangkatkan oleh Pak Zarkasih dan Pak Wisnu ini pernah mengalami kasus ketidaksesuaian perjanjian kerja? Tadi sudah ditanyakan, tetapi belum dijawab. Dan bagaimana penyelesaiannya? Apakah perusahaan yang menempatkan terlibat dalam penyelesaian atau kemudian hanya pekerja migran yang menanggung masalah ketidaksesuaian kerja? Karena tadi dicontohkan misalnya cook ke assistant cook, banyak kasus yang kami dampingi, mereka yang perjanjian kerjanya adalah sebagai pekerja rumah tangga, tetapi kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, misalnya. Jadi, ini banyak sekali ketidaksesuaian yang ini mengakibatkan mereka tereksplorasi.

Kemudian yang kedua dari Pak KUSDIONO, tadi rekan kami dari SBMI, juga menanyakan sekarang bekerja di mana? Tadi Bapak dalam

pernyataan kedua menyampaikan bahwa memiliki perusahaan, ya, Pak, ya? Perusahaan apa, Pak? Boleh disampaikan pada kami? ... oh, bukan ... oh, ya, ya. Oke. Baik. Jadi sekarang ... oke, ya. Itu saja, terima kasih.

217. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan dijawab!

218. SAKSI DARI PEMOHON: ZARKASIH

Baik, Yang Mulia. Alhamdulillah selama ini dari 3.500 ... yang kami kirim ke luar negeri belum pernah terjadi kasus-kasus ketidaksesuaian dengan job itu, Yang Mulia. Kami tidak pernah terjadi itu, alhamdulillah.

219. KETUA: ANWAR USMAN

Yang lain?

220. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Kalau boleh saya jawab Ibu Nur apa ... Ibu Anis. Kalau bekerja tidak sesuai dengan pekam, mohon maaf tadi katanya janjinya pembantu rumah tangga ya ... eh, asisten rumah tangga, sampai di sana menjadi pekerja seks komersial. Menurut saya susah bingit[Sic!] dengan Undang-Undang Nomor 39 saja sudah tidak mungkin, kalau kita mau bicara yang lurus-lurus, ya. Artinya P3MI-nya, PJTKI-nya itu yang sesuai prosedur. Kan kami ... kita sebelum mengirim orang kan bikin job order. Job order itu perjanjian antara kita dengan user (...)

221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Wisnu, dijawab saja pertanyaannya, pernah tidak perusahaan Bapak itu mengalami seperti itu?

222. SAKSI DARI PEMOHON: WISNU WICAKSONO

Kalau kami tidak pernah mengirimkan dalam job order-nya elektronik misalnya, ternyata sampai di sana bekerjanya sebagai peladang, ini contoh yang gampang, ya. Tidak mungkin, Yang Mulia Hakim. Karena apa? Pada saat kita mau memberangkatkan, itu ada upload dalam sistem Sisko TKLN dan semua dokumen itu diverifikasi oleh verifikator dari BNP2TKI. Jadi kalau kita bicara yang benar, yang lurus, ya, enggak bisa. Kecuali mohon maaf, ini sekali lagi saya mohon maaf, para pelaku "Tarzan" yang bukan P3MI. Nah, kalau bukan P3MI bisa, dia enggak usah pakai job order, tidak usah pakai apa-apa, orang dikirim

melalui Batam. Di sana di Malaysia jadi PSK dan enggak perlu apa-apa, enggak perlu proses di BNP2TKI, Pak. Kalau saya tidak pernah menempatkan orang yang tidak sesuai dengan PK.

Yang pernah kami alami mungkin sebagai informasi. Pada waktu September 2011, Pak. Kita sudah proses, tiba-tiba perusahaan elektronik itu terdampak dengan black September, ya. Ya memang perusahaan sudah keluarkan visa 200 orang, tapi terus dibatalkan, tapi belum sempat terbang. Nah, itu memang kita harus beri penjelasan bahwa Anda tidak bisa berangkat karena dengan adanya 11 September itu tahun 2000, ya, perusahaan bangkrut dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau janjinya elektronik sampai di sana jadi ladang (...)

223. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah cukup, sudah sampai dibolak-balik. Ya, cukup, ya?

Baik, untuk sidang berikutnya apakah Kuasa Presiden akan menghadirkan ahli atau saksi, atau bagaimana, cukup?

224. PEMERINTAH: MARIA ERNA

Izin, Majelis Hakim yang saya muliakan. Untuk dari Pemerintah nanti kami akan segera menyampaikan permohonan apabila akan ada ahli akan kami hadirkan.

225. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu. Ya, jadi belum pasti, ya, koordinasi dulu. Baiklah kalau begitu, segera, ya, nanti supaya bisa diatur jadwal agenda berikutnya. Nah, untuk itu sidang ini ditunda (...)

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Pihak Terkait, Yang Mulia, mohon izin. Belum.

227. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi kalau ... ya, sekaligus gitu, ya. Ya, atau begini untuk kepastiannya, ya, kita dahulukan saja Pihak Terkait, ya. Karena Pihak Terkait katanya sudah menyiapkan ahli atau saksi, ya?

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

229. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, kalau begitu, jadi nanti bisa menyusul, ya, supaya memperlancar persidangan, apalagi dalam musim Covid-19 ini. Dari Pihak Terkait akan mengajukan ahli berapa orang atau saksi?

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dari Migrant Care akan menghadirkan tiga ahli dan tiga saksi, Yang Mulia. Karena ada saksi-saksi sebenarnya yang mengalami seperti tadi yang dikatakan Bapak-Bapak Saksi, itu sebenarnya mereka mengalami. Mungkin di perusahaan Bapak-Bapak ini menjalani perusahaannya dengan benar, tapi ada perusahaan-perusahaan lain yang sebenarnya juga apa namanya ... melakukan caranya dengan tidak benar. Ini kita akan menghadirkan saksi untuk dari Migrant Care dan dari SBMI dan juga akan menghadirkan saksi korban.

231. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, kesimpulannya Migrant Care tiga ahli dan tiga saksi.

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tiga saksi dan tiga ahli.

233. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian Serikat Buruh, dua (...)

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dua ahli dan dua saksi, Yang Mulia.

235. KETUA: ANWAR USMAN

Nah, kalau begitu begini, kita dengar dulu ahlinya, ya, 3 orang tadi untuk Migrant Care.

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Migrant Care.

237. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi dan seterusnya maksudnya dari Serikat Buruh pada sidang berikutnya.

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

239. KETUA: ANWAR USMAN

Begitu juga untuk Pemerintah nanti dikoordinasikan dulu. Saudara harus menyerahkan nama dan CV dan keterangan tertulis dari ahlinya itu, paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya. Baik, begitu ya Pemohon, Kuasa Presiden, ya? Sidang berikutnya diundur tanggal 15 Juli 2020, hari Rabu, pukul 11.00 WIB. Dengan agenda mendengar tiga ahli dari Migrant Care. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.38 WIB

Jakarta, 1 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001